

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

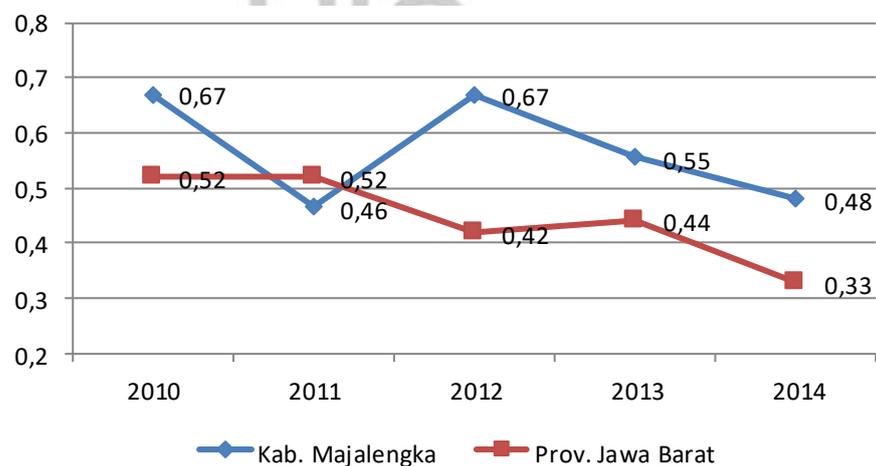
Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensi serta memiliki dampak sangat luas terhadap kualitas hidup manusia. Kemiskinan adalah situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan dan ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. (Damayanti, 2016)

Parwoto (dalam Barika, 2013:27) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. (Barika, 2013) Sedangkan menurut Ravallion (dalam Durrotul Mahsunah, 2013:3), kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyaidana untuk berobat. (Mahsunah, 2013)

Kemiskinan merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya angka kemiskinan. Dalam upaya menekan angka kemiskinan pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Guna terlaksananya program pengentasan kemiskinan yang optimal, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia

yang berasal dari akar rumput masyarakat dan *concern* pada masalah sosial. Untuk itu, pada tahun 2009 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dalam melaksanakan tugasnya akan bersinergi, berjejaring, dan bermitra dengan berbagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sebagai wilayah yang majemuk, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Majalengka tidak kunjung tertanggulangi secara optimal. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) Kabupaten Majalengka selama tahun 2010 – 2014 tergolong tinggi, bahkan hampir setiap tahun berada di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diperlihatkan dalam grafik berikut :



Gambar 1.1 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010 – 2014

Sumber *Online*: <http://jabar.bps.go.id/>, di akses tanggal 03 Desember 2016

Majalengka 0,15 *point* di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, dan mengalami penurunan sebesar 0,21 *point* di tahun 2011 atau 0,06 *point* di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2012, dengan peningkatan sebesar 0,21 *point* dari Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2011, atau 0,25 *point* di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Di tahun berikutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majalengka kembali turun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,09 *point*. Meskipun mengalami penurunan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majalengka pada tahun 2013 dan tahun 2014 tetap berada di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat.

Melihat tingginya Indeks Keparahan Kemiskinan, untuk menanggulangnya Pemerintah Kabupaten Majalengka tentu tidak dapat bekerja sendiri, perlu dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinator, administrator, dan fasilitator. Sebagai koordinator, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi yang

berkaitan dengan kerjasama, sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam fungsinya sebagai administrator, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan perencanaan dan pengorganisasian, serta melaksanakan dan memantau penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsi fasilitator dilaksanakan dengan cara melakukan pendampingan sosial; secara langsung maupun tidak langsung (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidaklah mudah, mengingat hanya 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang memiliki wilayah kerja mencakup 1 (satu) wilayah kecamatan yang sangat luas dengan beragam masalah sosial. Sangatlah mungkin dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menemui banyak hambatan sehingga tidak mampu berperan secara optimal, seperti yang terjadi di Kecamatan Talaga.

Hasil studi pendahuluan melalui wawancara tidak struktur terhadap Petugas Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Program yang sudah terlaksanakan sampai saat ini seperti KUBE tahun 2011 yang mendapat bantuannya ada 5 Desa di bagi ke dalam kelompok yang berjumlah 35 kelompok 350 orang rata-rata perkelompok mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp. 219.600 juta sampai 20 juta perkelompoknya, uang tersebut di gunakan untuk membeli domba beserta obat-obatan dan kandangnya. Selain

itu bantuan lainnya pada tahun 2010 seperti UEP (usaha ekonomi produktif) yang mendapat bantuan ada 2 desa, bantuan lainnya juga seperti JAMKESDA, KIS (kartu indonesia Sehat) dari BPJS, penerimaan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menurut petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bantuan lainnya masih banyak namun belum terlealisasikan oleh pihak Dinsos kepada kecamatan setempat. Sementara hasil wawancara penulis dengan 20 (duapuluh) keluarga miskin yang tersebar di Desa Talaga Wetan menunjukkan bahwa hanya 5 (lima) keluarga yang mengetahui dan pernah dikunjungi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Namun kelima keluarga tersebut mengatakan bahwa mereka hanya didata, dan hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya (Studi Pendahuluan, dilaksanakan tanggal 04 Desember 2016).

Hal inilah yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan Setelah hampir 8 (delapan) tahun terbentuk, peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan masih dipertanyakan, khususnya di Kecamatan Talaga. Sehingga dengan keadaan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Talaga yang kemudian di tuangkan dalam judul : **“Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana Keberdayaan Keluarga Miskin di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ?
3. Bagaimana hasil Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ?
2. Untuk mengetahui keberdayaan Keluarga Miskin di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ?
3. Untuk Mengetahui hasil Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bila dilihat dari teoritis maupun praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam terutama tentang kesejahteraan Keluarga miskin
- b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan.

b. Bagi masyarakat

Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana Peranan Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan dalam meningkatkan keluarga miskin.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian :

1. Skripsi Oleh Fazra Raissa Wulandari (2011), tentang Peran Pekerja Sosial Masyarakat Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Desa Lebak wangi Kecamatan Sepatan Timur Tangerang dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta salah satunya adalah Kelompok usaha bersama “Monalisa” lebak wangi kecamatan sepatan timur berdiri pada tahun 2008 yang dibentuk oleh Dinas sosial Kabupaten Tangerang, KUBE ini dibentuk dengan latar belakang ingin meningkatkan kesejahteraan atau pengembangan usaha ekonomi keluarga miskin , karena begitu banyaknya pengangguran dan anak-anak putus sekolah yang hanya berdiam diri dan mengakibatkan kemiskinan. KUBE monalisa berawal dari pembuatan kue biasa dikelola oleh pribadi bergerak pada pembuatan kue kering seperti kripik , peyek , kripik pisang dll yang berjumlah 10 orang. dari hasil penelitian bahwa peran pendampingan sangat diperlukan agar KUBE dapat berjalan dan berkembang dengan ditampilkannya pendampingan-pendampingan adalah seorang pekerja sosial ,di bidang kemasyarakatan yang perannya meliputi perencana, pembimbing , pemberi informasi , motivator , fasilitator ,dan evaluator. pendamping bukan seorang penyembuh tetapi adalah seorang pemecah masalah.

2. Skripsi Ruli Insani Adhitya (2016) , tentang Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi kasus tenaga kesejahteraan sosial kecamatan umbulharjo dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan pakualaman) bahwa masalah sosial yang menjadi prioritas program pelayanan sosial TKSK adalah kemiskinan. Kemudian peran-peran TKSK sebagai motivator, dinamisator , invantor , evaluator , coordinator , dan administrator dianalisis dalam hal penanganan masalah kemiskinan tersebut. Tingkat efektifitas peran TKSK dalam pendampingan sosial masalah kemiskinan sudah cukup efektif. Lima peran dari total enam peran TKSK sudah cukup baik setelah dianalisis melalui indikator efektifitas. Secara keseluruhan peran TKSK dapat berjalan efektif dikarenakan adanya dukungan , bantuan ,pengakuan, dan juga sinergitas antara TKSK dengan pihak pemerintah dan PSKS di wilayah.
3. Jurnal Wisnu Andrianto , M. Saleh Soeaidy, Stefanus Pani Rengu Universitas Brawijaya Malang (2014) Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas daerah paling besar di provinsi Jawa Timur. Namun Kabupaten Malang juga merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Malang. Masih rendahnya akses

pendidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadi banyak fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 155.745 jiwa, dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih sangat rendah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangatlah strategis dalam menunjang usaha Dinas Sosial Kabupaten.

Hasil ketiga penelitian di atas terkait peran TKSK (Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) menunjukkan bahwa, keberadaan tenaga kesejahteraan sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan pekerja sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan fakir miskin bahwa TKSK adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan-pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial,

tetapi biasanya terdapat beberapa kendala , diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinasi bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan.

Oleh karena saya mengambil judul Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin itu Untuk menjabatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinasi/manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan/menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan berupa bantuan-bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin.

E. Kerangka Berpikir

TKSK adalah salah satu jenis sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang didik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga

pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. (Dalam pelaksanaan tugasnya memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, TKSK bekerja dengan arahan dari kementerian sosial dan melakukan koordinasi dengan dinas sosial Kabupaten atau kota. TKSK telah ada sejak tahun 2009 dan telah banyak berperan dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun berdasarkan hasil penelusuran penelitian hingga penelitian ini dilaksanakan, penelitian tidak menemukan standar peran ataupun standar kinerja yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai alat untuk menilai hasil kerja TKSK.(undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan pasal 1)

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang; seperti kehidupan keluarga dan anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan. (Notowidagdo, 2016, p. 38)

Keberadaan tenaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan pekerjaan sosial adapun beberapa karakteristik Pekerjaan Sosial :

1. Pekerjaan sosial dipandang sebagai sebuah bidang keahlian (profesi), yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktik (dicirikan) dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi). Dengan demikian, pekerjaan sosial dalam konteks ini harus dibedakan dengan ‘kegiatan sosial’(*charity/philanthropy*) yang dapat dilaksanakan oleh siapapun yang memiliki keinginan untuk berbuat baik kepada sesama.
2. Para penyandang profesi pekerjaan sosial memiliki kewenangan sebagai akibat sosial dari pendidikan keahliannya, untuk menyelenggarakan pelayanan sosial dalam semua bentuk dan tingkatnya.
3. Keahlian khusus dalam profesi pekerjaan sosial adalah manipulasi perilaku manusia (secara individual maupun dalam unit sosial), yang ditunjukkan untuk meningkatkan keberfuangsan sosial manusia sebagai makhluk sosial. (s., 2010)

Pekerjaan sosial sebagai Profesi yang memiliki kewenangan keahliannya; dan pekerja sosial sebagai pelaku-pelaku profesi tersebut. Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai : pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi dikembangkan sebagai komponen praktis dari kesejahteraan sosial, yang menerapkan hasil-hasil kajian kesejahteraan sosial tentang kehidupan sosial manusia. Secara sederhana , pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu “Bidang keahlian yang memiliki wewenang untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam

melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan”.

The major focus is on reducing problem inhuman relationships and on enriching living through improved human interaction/ (Skidmore and Thackeray, 1988:8) (Budhi Wibhawa, 2010)

Zastrow, Charles, menjelaskan definisi pekerjaan sosial sebagai berikut: Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya. (Budhi Wibhawa, 2010, p. 45)

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (end) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. (Edi Suharto, 2014)

Friedlander (1980) kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan

dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. (Prof. Adi Fahrudin, 2014, p. 9)

Indikator keluarga sejahtera berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya mengetahui masih sederhana.

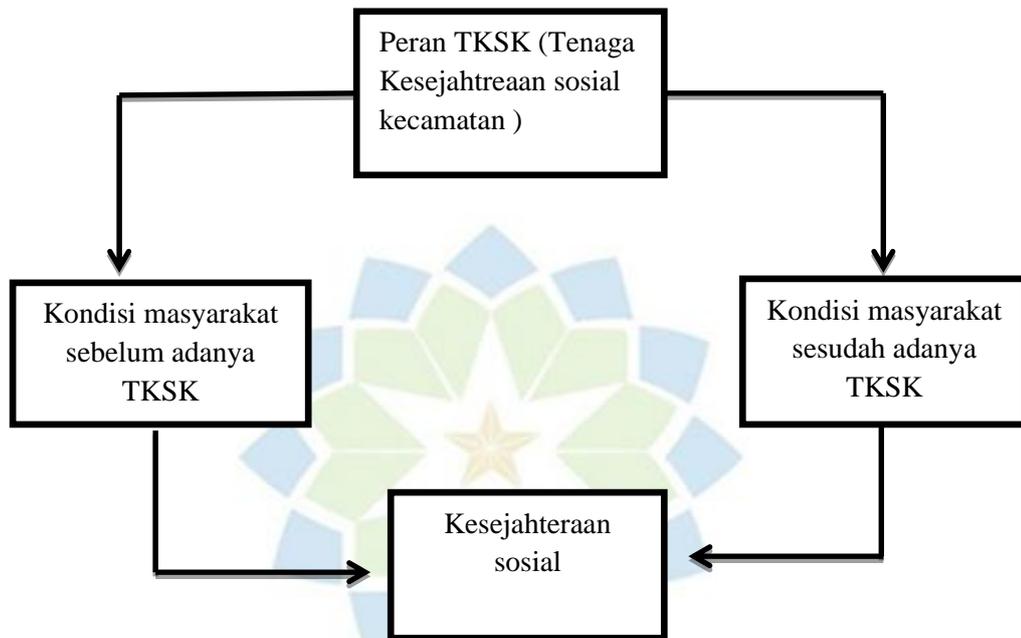
Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta indikator yang menjadi syarat atau ukurannya :

- a. Keluarga Pra-sejahtera
- b. Keluarga sejahtera Tingkat I (KS I)
- c. Keluarga sejahtera tingkat II (KS II)
- d. Keluarga sejahtera Tingkat III (KS III)
- e. Keluarga sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus). (Wiguna, 2015)

Sedangkan yang dimaksud Kesejahteraan keluarga dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual)

- 1) *Economical well-being* : yaitu kesejahteraan ekonomi ; indicator yang digunakan adalah pendapatan (GNP, DDP, pendampingan per kapita perbulan, nilai asset).
- 2) *Social well-being* yaitu kesejahteraan ekonomi ; indicator yang digunakan diantaranya tingkat pendidikan (SD/MI-SMP/MTS-MA/MA-PT, pendidikan non-formal Paket A, B, C : melek aksara atau buta aksara) dan status dan jenis pekerjaan (white collar = elit/ professional , blue collar = proletar/ buruh pekerja; punya pekerjaan tetap atau pengangguran).
- 3) *Physical well-being* , yaitu kesejahteraan fisik ; indicator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan , tingkat mortalitas tingkat morbiditas.
- 4) *Psychological spiritual* mental yaitu kesejahteraan psikolog ; indikator yang digunakan adalah sakit jiwa , tingkat stress , tingkat bunung diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, tingkat criminal (perkosaan pencurian/perampokan, penyiksaan atau pembunuhan, penggunaan narkoba/NAPZA, perusakan) tingkat kebebasan seks. (Puspitawati, 2013).

Dalam pemikiran diatas dapat di gambarkan Skema Sebagai berikut :



Gambar 1.1
Skema Kerangka Berpikir

F. Langkah-langkah penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan aktivitas alamiah yang sistematis terarah dan mempunyai tujuan. Oleh karena itu dalam prosesnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Secara umum, penelitian ini dilakukan di Desa Talaga Wetan Kabupaten Majalengka, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan alasan akademis, kerana berkaitan erat dalam bidang studi yang di hadapi oleh peneliti.
- b. Alasan teknis, lokasi ini tidak jauh sehingga mudah dijangkau karena lokasi penelitian berdekatan dengan tempat tinggal peneliti.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, karena metode ini digunakan untuk memeberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, factual serta akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki di tempat penelitian. Hai ini sesuai dengan definisi metode deskriptif yaitu metode yang berusaha untuk memperoleh gambaran kenyataan yang sebenarnya dilapangan secara sistematis. (Arikunto, 1991)

Metode penelitian dekripsi dimaksudkan bagi sebuah penelitian bagi sebuah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lainnya. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata

lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa dan tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Oleh karena itu, Penulis akan mendeskripsikan berdasarkan data yang telah terkumpul mengenai Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin. Penekanan utama dari penelitian ini adalah kesejahteraan di bidang keluarga.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif (Hasan Bisri, 2001:63) merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya lagi data akan dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian.

Dalam penelitian ini Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dengan informan keluarga Miskin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kelompok terkait dan beberapa buku-buku pendukung penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari observasi, pengamatan dan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam kesejahteraan melalui peranan Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan sebagai penguat data primer, atau data yang diperoleh dari buku, jurnal, arsip, literatur, artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian kesejahteraan keluarga bagi keluarga miskin.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Panduan Penyusunan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013:84). Sedangkan Creswell (2014:267) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses penelitian yang secara langsung peneliti turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

Tujuan observasi dalam penelitian ini, yaitu untuk menghimpun data secara langsung, observasi ini dilakukan dalam waktu dua minggu sekali, sedangkan teknik observasi ini dengan cara mengamati, merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pernyataan yang ingin diketahui peneliti) di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara, yaitu teknik memperoleh informasi melalui tanya jawab yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun untuk memperoleh data informasi ini, peneliti langsung ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan wawancara ini yang diharapkan dapat diperoleh data dengan jelas dan lengkap dan sesuai apa yang dibutuhkan. Mereka yang diajak wawancara antara lain, keluarga miskin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Adapun hasil dokumentasi yang diperoleh yaitu jurnal serta laporan penelitian yang menyangkut hal tersebut.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan membaca buku-buku, jurnal ilmiah dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, skripsi maupun tesis sebagai acuan penelitian terdahulu, dan dengan cara *browsing* di internet untuk mencari artikel-artikel serta jurnal-jurnal atau data-data yang dapat membantu hasil dari penelitian.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data, dilakukan dengan cara menggabungkan jawaban-jawaban dan pendapat. Untuk data yang bersifat kualitatif akan dianalisis dengan cara sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Proses ini dimaksudkan untuk mengefesienkan waktu, biaya, proses pencarian data dan lain sebagainya dalam penelitian. Agar penelitian ini tidak keluar dari tujuan awal, maka harus tahu terlebih dahulu data apa yang kita butuhkan. Mulai dari data yang sifatnya umum dikelompokkan kemudian dikategorisasikan dan diklasifikasikan supaya lebih mudah dalam proses penelitian. Dalam hal ini data yang dibutuhkan yakni tentang peranan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

b. Klarifikasi Data

Data yang sudah terkumpul sesuai dengan topik pembahasan penelitian, yaitu peranan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yaitu membahas Studi Deskriptif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

c. Verifikasi Data

Langkah ini dilakukan untuk menguji data yang didapat tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan teori-teori yang telah dibahas dalam kerangka pemikiran. Langkah ini dimaksudkan agar adanya keselarasan antara teori yang didapatkan dengan realita yang ada.

d. Menarik kesimpulan

Sebagai suatu langkah terakhir dari penelitian ini dan dari data yang telah terkumpul, akan ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin.